

**BULETIN ILMIAH
LITBANG PERDAGANGAN**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KAJIAN KEMUNGKINAN PEMBENTUKAN KERJASAMA PERDAGANGAN DAN INVESTASI ASIA TIMUR	125 - 158
<i>(DAMPAK PERKEMBANGAN KERJASA EKONOMI KAWASAN ASIA TIMUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA)</i> <i>Oleh : Umar Fakhruddin, Irma Rahmawati</i>	
APRESIASI KONSUMEN TERHADAP MERK (BRAND) DALAM NEGERI	159 - 186
<i>Oleh : Hamdani Surachman dan Guido Benny</i>	
KINERJA PERDAGANGAN LINTAS BATAS NTT-TIMOR LESTE	187 - 215
<i>Oleh : Sukarna Wiranta</i>	
KEBIJAKAN HAMBATAN PERDAGANGAN ATAS PRODUK EKSPOR INDONESIA DI NEGARA MITRA DAGANG	216 - 236
<i>Oleh : Umar Fakhruddin</i>	
KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG PERDAGANGAN YANG MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA TINGGI	237 - 263
<i>Oleh : Firman Mutakin</i>	
DAMPAK KEBIJAKAN PERDAGANGAN GULA TERHADAP PROFITABILITAS USAHA TANI TEBU : KASUS DI KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH	264 - 286
<i>Oleh : Tjetjep Nurasa, Iwan Setiajie A.</i>	

PENGANTAR REDAKSI

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan edisi ini mengetengahkan berbagai permasalahan di bidang perdagangan baik yang menyangkut masalah kebijakan, kelembagaan maupun produk dan memuat 6 (enam) artikel.

Artikel pertama menganalisa mengenai kemungkinan Pembentukan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Asia Timur (Dampak Perkembangan Kerjasama Ekonomi Kawasan Asia Timur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia) yang pada dasarnya menjelaskan bagaimana posisi Indonesia dapat memposisikan dan menempatkan diri pada kemungkinan pembentukan kawasan Asia Timur.

Artikel kedua mengupas mengenai Apresiasi Konsumen Terhadap Merk (Brand) Dalam Negeri, dimana nama merk merupakan salah satu strategi dalam pemasaran suatu produk sehingga produk yang bermerk tersebut tetap memperoleh kesetiaan dari pelanggan.

Artikel ketiga membahas Kinerja Perdagangan Lintas Batas NTT - Timor Lestee yang intinya mengupayakan bagaimana memberdayakan masyarakat perbatasan sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Artikel keempat membahas mengenai Hambatan Perdagangan Atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang. Tulisan ini memberikan gambaran bahwa pada 21 negara, kontribusi hambatan non tarif terhadap hambatan perdagangan secara umum lebih besar dari hambatan tarif dan proteksi pada sektor pertanian lebih besar daripada di sektor manufaktur.

Artikel kelima membahas tentang Kebijakan Daerah di Bidang Perdagangan yang Menyebabkan Ekonomi Biaya Tinggi. Pada dasarnya, tulisan ini menyoroti isi beberapa Peraturan Daerah yang masih dirasakan sebagai penyebab ekonomi biaya tinggi.

Tulisan terakhir yang merupakan artikel keenam menganalisis mengenai Dampak Kebijakan Perdagangan Gula Terhadap Profitabilitas Usaha Tani Tebu, terutama Kasus di Kabupaten Klaten, dimana Kebijakan perubahan harga akan membawa perubahan pada nilai produksi yang selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan bersih usaha tani.

Dewan Redaksi

KAJIAN KEMUNGKINAN PEMBENTUKAN KERJASAMA PERDAGANGAN DAN INVESTASI ASIA TIMUR (DAMPAK PERKEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI KAWASAN ASIA TIMUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA)¹

Oleh : Umar Fakhrudin, Irma Rahmawati²

ABSTRAK

Studi ini berusaha menerangkan bagaimana Indonesia dapat memposisikan dan menempatkan dirinya pada kemungkinan pembentukan kawasan ekonomi Asia Timur. Terlihat dari analisis model gravitasi dan Computed General Equilibrium (CGE), Indonesia dapat meraup keuntungan yang lebih besar jika kawasan ini terbentuk. Namun hal ini perlu juga memperhatikan isu-isu regionalisasi ASEAN serta isu-isu perpolitikan internasional lainnya. Foreign Direct

Investment (FDI) Indonesia yang masih rendah juga perlu ditingkatkan performanya dalam jangka pendek sambil meningkatkan kapasitasnya pada jangka panjang untuk meningkatkan arus perdagangan internasionalnya. Indonesia juga perlu menempatkan diri secara strategis dalam jaringan produksi di kawasan ini, dengan memperhatikan kaitan produksi secara forward dan backward linkage, pada arus trend integrasi produksi kawasan Asia Timur yang semakin menguat.

PENDAHULUAN

Perkembangan Ekonomi secara global dalam dasawarsa terakhir mengalami perubahan yang cukup pesat. Beberapa diantaranya ditandai dengan munculnya berbagai kerjasama antara

blok – blok perdagangan maupun ekonomi baru yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Sebagai salah satu contoh adalah Uni Eropa , sampai saat ini telah beranggotakan 35 negara. Perkembangan ini memunculkan sisi positif dimana potensi suatu kawasan dapat

¹ Rangkuman Laporan kajian Puslitbangdaglu tahun 2007

² Calon Peneliti di Puslitbangdaglu

dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan perekonomian baru bagi suatu. Sudah barang tentu kerjasama yang ada tidak hanya sekedar dalam kerjasama perdagangan, namun juga kerjasama Investasi.

Dari catatan sejarah, pembentukan kerjasama ekonomi di wilayah Asia Timur dimulai sejak tahun 1940 dengan ditelurkannya Greater East Asia Co-prosperity (Asia Timur Raya). Namun, ide ini justru berkembang menjadi ekspansi penjajahan. 26 tahun berikutnya, di Asia Tenggara muncul inisiasi pembentukan kerjasama ekonomi, akhirnya berlanjut hingga saat ini, yaitu Association of South East Asia Nation (ASEAN). Ide integrasi ekonomi selanjutnya dimunculkan oleh Perdana Menteri Malaysia waktu itu (1991) yaitu Mahathir Muhamad dengan ide East Asia Economic Group.

Ide integrasi ekonomi di Asia Timur mulai berkembang dan ada pula yang telah memasuki tahap – tahap realisasi hingga saat ini. Ide integrasi yang cukup berkembang hingga saat ini adalah pembentukan East Asian Community (EAC). EAC merupakan rangkaian lanjutan ASEAN + 3 (1997) yang melahirkan East Asian Vision Group & East Asia Study Group (1998) dilanjutkan dengan diselenggarakannya East Asia Summit pada tahun 2002. East Asia Summit menyepakati dibentuknya East Asia Forum dan Network of East Asian Think-tanks (NEAT) pada tahun 2003. NEAT inilah yang mendapatkan mandat untuk membentuk

induk EAC yaitu Council on East Asian Community. Perkembangan terakhir dari kinerja EAC adalah penyelenggaraan konferensi tahunan ke-empatnya. Untuk awalnya EAC merupakan integrasi empat negara besar di Asia Timur bagian Utara yaitu: Jepang, Korea, China dan India.

Dari periode tahun 2002 hingga tahun 2005 terjadi pertumbuhan kerjasama yang sangat mencengangkan antar negara di Asia Timur. Menurut data Asian Regional Integration Center, dari kurang lebih 10 (sepuluh) bentuk kerjasama bilateral maupun regional menjadi 32 bentuk kerjasama baik yang sudah dalam implementasi maupun sedang dalam proses perundingan ataupun pengajuan proposal. Namun, amat disayangkan dari sekian jumlah kerjasama yang ada, Indonesia baru hanya memiliki atau memanfaatkan 9 kerjasama. Dari delapan kerjasama yang ada, hanya baru dua atau tiga jenis kerjasama yaitu ASEAN, ASEAN – China dan Indonesia – Jepang (IJEPA).

Asia Timur merupakan kawasan yang merepresentasikan +48% dari konsumen dunia. Suatu jumlah yang tidak kecil sebagai pasar produk dan komoditi. Disamping memiliki jumlah populasi yang cukup besar, kendala kultur maupun kendala jarak dapat mempengaruhi harga maupun penetrasi pasar. Namun, permasalahan ini dapat diminimalisir karena negara – negara di Asia Timur masih berada dalam satu kawasan dengan kultur yang relatif sama dan jarak yang tidak begitu jauh.

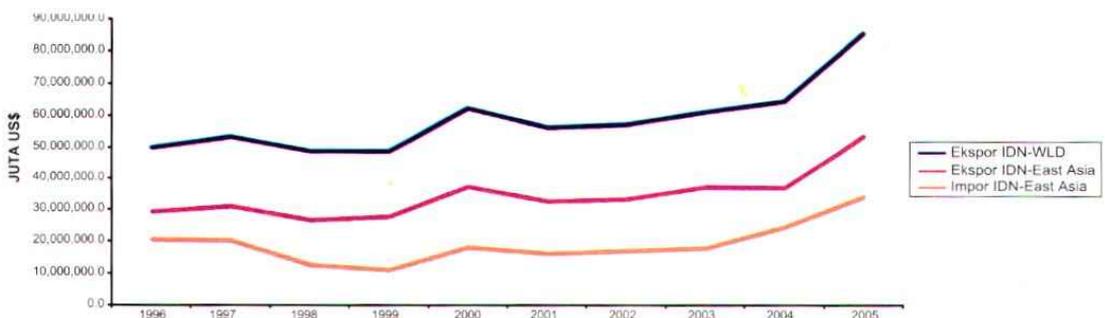
Dari sisi ekonomi, nilai gabungan GDP sebesar 9,7 triliun US\$ di tahun 2005. Nilai ini merupakan pertumbuhan gabungan GDP sebesar 30,0% dari nilai gabungan pada tahun 2002 (7,4 triliun US\$). Bukan merupakan nilai yang kecil untuk ukuran gabungan nilai GDP 10 negara. Pertumbuhan besar dari gabungan nilai GDP dipengaruhi oleh pertumbuhan masing masing negara di dalam kawasan yang mengalami pertumbuhan cukup mencengangkan dalam tiga tahun terakhir pada periode 2002 – 2005. India merupakan negara dengan pertumbuhan GDP terbesar pada periode tersebut dengan besar pertumbuhan hingga 56,41% diikuti China dengan pertumbuhan 53,67% lalu Korea Selatan dengan pertumbuhan sebesar 44,06%. Namun, untuk 5 besar, nilai GDP diduduki oleh Jepang (US\$ 4,6 triliun), China (US\$ 2,2 triliun), Korea (US\$ 0,78 triliun), India (US\$ 0,77 triliun), dan Taiwan (US\$ 0,35 triliun). Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan asia timur

lebih banyak terjadi di bagian utara, yaitu di negara negara yang memiliki GDP terbesar.

Sedangkan apabila dilihat dari kinerja perdagangan Indonesia, terlihat bahwa Ekspor Indonesia ke Asia Timur selalu sejalan dengan kinerja Ekspor Indonesia ke Dunia. Berarti dalam hal ini kinerja Ekspor Indonesia ke dunia terpengaruh oleh kinerja Ekspor Indonesia ke kawasan Timur. Keterpengaruh ini disebabkan karena lebih dari 50% ekspor non migas Indonesia dipasarkan di Kawasan Asia Timur.

Oleh karena itu menjadi pertanyaan besar adalah apakah pertumbuhan yang terus terjadi dalam skala yang tidak kecil di kawasan Asia Timur akan dibiarkan begitu saja atautkah ada langkah yang dapat diambil agar pertumbuhan ini juga mampu memacu pertumbuhan perekonomian dalam negeri sekaligus memanfat-

Gambar 1. Perkembangan Perdagangan Indonesia dengan Dunia dan Asia Timur, 1996 – 2005



Sumber : UNCOMTRADE (WITS), diolah Puslitbangdaglu

kan sumber sumber investasi yang ada di dalam kawasan. Kaitannya dengan pertanyaan di atas adalah menjadi perlu apabila Indonesia dapat mengkaji arah perdagangan di kawasan Asia Timur agar Indonesia tidak tertinggal dalam hubungan keterkaitan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Timur.

Selain yang tersebut di atas adalah menjadi pertanyaan pula, apakah yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi perubahan yang terjadi serta berkaca dari mulai turunnya trend ekspor Indonesia ke negara negara mitra dagang utama. Tentunya adalah melihat implikasi jauh ke depan apabila Indonesia mengambil atau tidak dalam peran di dalam kerjasama yang terjadi di Kawasan Asia Timur.

Teori Interdependensi dan Regionalisme dalam Ekonomi Politik Internasional

Penelitian ini akan menggunakan kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk pendekatan kualitatif digunakan pendekatan interdependensi yang diajukan oleh Robert E. Keohane³ dan regionalisme baru oleh Bjorn Hettne dan Frederick Soderbaum⁴. Pendekatan ini dilandasi oleh asumsi liberalisme yang menekankan pada hasil kolektif dari

tindakan-tindakan individu yang membawa analisis tentang pasar, kegagalan pasar dan pentingnya institusi untuk mengatasi kegagalan pasar. Inti pemikiran Keohane adalah, saling ketergantungan atau interdependensi di antara manusia menyebabkan perselisihan, yang menghasilkan kebutuhan untuk hadirnya institusi.

Dalam konteks regionalisme, Bjorn Hettne dan Frederick Soderbaum menjelaskan tentang munculnya *new regionalism* dalam bentuk *free trade area* sejak pertengahan 1980-an, yang mencerminkan transformasi sistem global yang komprehensif. "Regionalisme baru" ini secara umum berkaitan dengan dengan program dan strategi yang mengarah kepada pembentukan institusi secara formal. Proses yang mengarah pada regionalisme ini disebut "regionalisasi", yang menunjukkan proses empiris yang mengarah kepada pola kerjasama, integrasi, *complementarity* dan konvergensi dalam batas-batas antar wilayah tertentu.

Teori Pertumbuhan Ekonomi dalam Perdagangan Internasional

Secara keseluruhan, perekonomian dunia dapat dibagi menjadi empat grup, yaitu perekonomian berpendapatan rendah (seperti negara-negara subsahara afrika), perekonomian berpendapatan menengah

³ Robert E. Keohane, *Power and Governance in a Partially Globalized World*, London & New York: Routledge, 2002.

⁴ Bjorn Hettne dan Frederick Soderbaum, "Theorising the Rise of Regionness", dalam *New Political Economy*, Vol.5, November 2000.

kebawah (seperti negara-negara Amerika Latin), perekonomian berpendapatan menengah keatas (seperti Malaysia, Saudi Arabia, dll) dan perekonomian berpendapatan tinggi (seperti Singapura, Kuwait, dsb).⁵ Negara-negara pada tiga kategori pertama kebanyakan pada proses pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan mempunyai gap yang amat besar dengan negara-negara maju.

Apakah gap pendapatan nasional dari negara-negara di dunia semakin mendekat satu sama lain atau semakin menjauh? Sebagai ilustrasi, Amerika Serikat tumbuh sebesar 2 persen pada periode tahun 1960-1992 yang menurut para ekonom merupakan pertumbuhan jangka panjang-maksimum yang bisa dicapai sebuah perekonomian yang telah maju. Kanada yang 27 persen lebih miskin dari Amerika Serikat di tahun 1960 mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada jangka periode yang sama sekitar 2.6 persen. Hal ini menyebabkan gap dari pendapatan nasional antara Kanada dan Amerika hanya terpaut 9 persen (yg sebelumnya 27 persen). Bagaimanakah hal ini bisa terjadi?

Teori konvergensi pertumbuhan ekonomilah yang ada di balik semua proses yang diilustrasikan diatas. Teori ini menyatakan adanya proses konvergensi dari pendapatan per kapita di negara-

negara dunia. Jika perdagangan internasional adalah semakin bebas, maka modal dapat bergerak kepada negara-negara yang memberikan *return* tertinggi, dan jika pengetahuan (teknologi) dapat bergerak diantara batasan-batasan politik dengan bebas maka semua negara akan mempunyai akses terhadap teknologi produksi yang efisien sehingga tidak ada lagi alasan bagi perbedaan pendapatan internasional yang signifikan untuk terjadi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini juga didukung oleh teori-teori perdagangan internasional klasik seperti teori *comparative advantage* yang menjabarkan keuntungan yang didapat dengan adanya perdagangan antar dua negara atau kawasan.

Teori Gravitasi dalam Perdagangan Internasional

Penggunaan pendekatan model gravitasi terhadap arus perdagangan internasional dikembangkan secara terpisah oleh Tinbergen (1962) dan kemudian Pöyhönen (1963). Linneman (1966) menambahkan variable dan bergerak lebih jauh dengan membentuk justifikasi teoritis dalam bentuk system keseimbangan umum Walrasian.

Teori Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Tanpa adanya investasi,

⁵ Krugman, Pauk R. Dan M. Obstfeld, "International Economics: Theory and Policy", Addison-Wesley Publisher, 2000. Hal. 679.

Tabel 1 : Dasar Teoretis dan Konsep Utama dari Penggunaan Hukum Gravitasi dalam Ilmu Sosial dan Ekonomi⁶

Latar Belakang	Teori Konsep	Utama Pengarang
Ilmu regional, geografi ekonomi	Pengukuran hubungan intraregional dan pengaruhnya pada perilaku individu. Wilayah (seperti negara, propinsi, etc) dianggap sebagai massa (seperti yang dimaksud dalam teori gravitasi Newton). Lokasi dari perusahaan dipandu oleh dua kekuatan yang mendasar : 1) Skala ekonomi pada tingkat pabrik, dan 2) Biaya-biaya perdagangan	Carey (1858), Reilly (1929), Steawart (1948), Isard dan Freutel (1954), Hammer dan Ikle (1957), Carrothers (1959), Isard (1960), Harvey (1969), Nijkamp dan Reggiani (1992), Krugman (1991, 1998), Davis dan Weinstein (1996), Fujita et al. (1999)
Mikroekonomi, maksimalisasi utilitas, dan ekuilibrium umum	Alokasi optimal dari anggaran yang tersedia bisa didapat dengan mempostulasikan fungsi utilitas untuk pembuat keputusan yang merefleksikan preferensi relatif. Mengasumsikan batasan anggaran bersifat linear, volume transaksi antara dua titik bisa dinyatakan sebagai permasalahan maksimalisasi utilitas. Model yang menggunakan teori gravitasi bisa diturunkan dengan memaksimalkan fungsi utilitas.	Linnemann (1966), Niedercorn dan Bechdolt (1969), Golob dan Beckman (1971), Nijkamp (1975), Bergstrand (1985), Nijkamp dan Reggiani (1992)
Teori perdagangan, yang berbeda dalam hal pencapaian spesialisasi produk yang didapat dari ekuilibrium : 1) Perbedaan teknologi antar negara dalam model Ricardian, 2) Variasi dalam perbedaan sumber daya antar negara dalam kerangka model H-O (Heckser-Ohlin) 3) Tingkat return yang meningkat pada level perusahaan menurut kerangka model IRS	Model gravitasi untuk perdagangan, dengan mempertimbangkan tiga faktor : 1) Total potensi penawaran (atau ekspor) dari suatu negara ke pasar dunia; 2) Total potensi permintaan (atau impor) dari suatu negara ke pasar dunia; 3) Faktor-faktor yang menciptakan resistensi terhadap perdagangan dan memberikan pengaruh pada intensitas perdagangan	Tinbergen (1962), Pöyhönen (1963), Linnemann (1966), Anderson (1979), Bergstrand (1985), Helpman dan Krugman (1985), Deardorff (1995), Evenett dan Keller (1998), Eichengreen dan Irwin (1998)

Sumber: Tiiu Paas, 2000.

⁶ Paas, Tiiu, "Gravity Approach for Modeling Trade Flows Between Estonia and The Main Trading Partners", University of Tartu, 2000

perekonomian riil satu negara tidak akan berjalan dan dapat mengalami stagnasi. Investasi berasal dari tabungan yang dilakukan oleh masyarakat negara tersebut. Bila tingkat tabungan suatu negara tinggi, kebutuhan investasi sektor riil akan terpenuhi oleh tabungan di negara tersebut (*self-sufficient*). Akan tetapi, bila tingkat tabungan suatu negara rendah, untuk memenuhi kebutuhan investasi sektor riil investasi asing sangat dibutuhkan.

Untuk penjelasan mengenai teori-teori **Foreign Direct Investment** menurut Meyer (1998), berikut adalah keterangan secara berurutan berdasarkan *unit of analysis*.

Financial Flow of FDI

Pemikiran dasar dari *capital market approach* adalah didasari perusahaan multinasional (*MNEs*) yang menghadapi adanya perbedaan *capital rent*. FDI diterapkan untuk mengatasi hambatan aliran modal internasional. *MNEs* melakukan kegiatannya di negara dengan *endowment* modal yang sangat melimpah dan tingkat suku bunga bunga yang rendah. *MNEs* berinvestasi di negara yang memiliki karakteristik *endowment* modal yang sedikit dan memiliki *capital rent* yang sangat tinggi. FDI bertindak sebagai arbitrase modal internasional. Perbedaan *return* interna-

sional menentukan *stocks* FDI di mana perubahan *relative return* menentukan aliran dari FDI.

The Location of Production

Konsep *locational advantage* yang diajukan oleh Caves (1982) dan Dunning (1993)⁷ mencakup beberapa determinan penentu lokasi. *Pertama*, keunggulan biaya produksi merupakan komponen yang penting dari pengambilan keputusan pada suatu industri. FDI tergantung pada biaya produksi di negara-negara alternatif tujuan FDI, khususnya dalam hal biaya tenaga kerja. *Kedua*, ada faktor lain yang *market related* juga merupakan determinan dari FDI, seperti infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, kualitas modal manusia misalnya pendidikan, motivasi karyawan; dan kualitas, realibilitas dan biaya *supply*.

Firms and Competition

Investor asing memiliki ketidakuntungan kompetitif relatif terhadap kompetitor lokal karena kurangnya informasi mengenai kondisi pasar lokal, biaya komunikasi dan transportasi. Untuk mengatasi ketidakuntungan ini, investor asing harus memiliki keunggulan *firm-specific*. *Ownership Advantage Theory* (Dunning, 1993)⁸ mengemukakan tiga keunggulan *firm-specific* atau *ownership*, yaitu:

⁷ Meyer, Klaus, "Direct Investment in Economies in Transition", Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 1998, hal. 62

⁸*Ibid.*, hlm 71.

1. Sumber daya yang berasal dari aset perusahaan tersebut, termasuk di dalamnya adalah kekayaan intelektual, hak paten, dan aset tidak berwujud yang ada pada modal manusia dalam perusahaan tersebut seperti manajemen, teknis, pemasaran, dan kemampuan keuangan.
2. Keunggulan *common governance* dari perusahaan yang sudah mapan, yaitu skala ekonomis pada tingkat perusahaan bukan hanya pada tingkat produksi.
3. Keunggulan *common governance* yang timbul karena perusahaan bersifat multinasional. Keunggulan ini ada karena kekuatan pasar, akumulasi teknologi global dan koneksi bisnis serta pengetahuan pengelolaan kegiatan yang berskala global.

- GDP_i dan GDP_j adalah pendapatan nasional negara i dan j
- $Distance_{ij}$ adalah jarak antara kedua negara tersebut

Untuk mendapatkan bentuk linear dari persamaan (1) maka kita ambil bentuk logaritma sehingga mendapatkan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Log} (\text{Trade}_{ij}) = \alpha + \beta_1 \log (GDP_i \cdot GDP_j) - \beta_2 \log (\text{Distance}_{ij}) + \varepsilon_{ij} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana α , β_1 , dan β_2 adalah koefisien yang akan dicari. Sedangkan error term untuk menggambarkan efek dari variabel selain GDP dan jarak yang bisa mempengaruhi perdagangan bilateral.

Persamaan (2) adalah inti dari persamaan *gravity model* dimana arus perdagangan bilateral diprediksikan memiliki fungsi positif pada pendapatan dan fungsi negatif pada jarak.

Beberapa peneliti selanjutnya menambahkan beberapa variabel yang dianggap mempengaruhi perdagangan bilateral selain pendapatan dan jarak.

Variabel-variabel dalam model gravitasi yang umum biasanya dalam bentuk sebagai berikut: Kekuatan perekonomian (*Economic Mass*), Pendapatan per kapita (*Income per Capita*), Jarak (*Distance*), Hubungan kedekatan (*Contiguous*), Akses langsung atau tidak langsung ke laut (*Landlocked*), Bahasa

Metode Pendekatan Model Gravitasi (Gravity Model)

Model gravitasi yang digunakan untuk menganalisa perdagangan bilateral dikembangkan oleh Tinbergen (1962) dan kemudian Pöyhönen (1963). Mereka menspesifikasikan persamaan *gravity model* sebagai berikut :

$$\text{Trade}_{ij} = \alpha \frac{GDP_i \cdot GDP_j}{\text{Distance}_{ij}} \dots\dots\dots 1$$

Dimana :

- Trade_{ij} adalah nilai perdagangan bilateral antara negara i dan j

dan hubungan kolonial (*Language and Colonial Links*), Preferential Trade Agreements (PTA).

Metode Ekonometri

Metode Ekonometri yang akan digunakan adalah metode OLS (*ordinary least square*) dan panel data. Fungsi *gravity model* yang telah dispesifikasikan akan ditaksir dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) standar. Selanjutnya hasil persamaan fungsi produksi tersebut akan diperiksa keberadaan multikolinearitasnya melalui matriks korelasi antar variabel, heteroskedastisitasnya melalui uji White dan otokorelasinya melalui uji Breusch-Godfrey dan Durbin Watson statistik. Juga akan dijelaskan dengan ringkas hasil-hasilnya, efek-efeknya dan pemanipulasiannya jika ketiga hal tersebut mengganggu kevalidan hasil estimasi yang didapatkan.

Dalam analisa model data panel, dikenal tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan kuadrat terkecil (*pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Nantinya kita akan menggunakan salah satu atau lebih dari pendekatan-pendekatan ini sesuai kebutuhan.

Metode General Equilibrium

Sampai saat ini, model *computable general equilibrium* (CGE) merupakan

metode terbaik untuk menganalisis dampak kebijakan yang bersifat *economy-wide*, yaitu dampak yang sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antar pasar atau antar sektor (Kenneth J. Arrow, 2005). Teori *General Equilibrium* (GE) memformalisasikan kenyataan bahwa pasar itu *inter-dependent*, perubahan *supply* dan *demand* di satu pasar mempengaruhi *supply* dan *demand* di pasar yang lain. CGE, adalah aplikasi teori GE dengan bantuan komputer, untuk menganalisis secara empiris dampak dari berbagai kebijakan *economy-wide* tersebut. Model CGE sudah diaplikasikan oleh beberapa pihak di Indonesia. Nama-nama model berbasis CGE tersebut diantaranya adalah INDORANI (UGM), WAYANG (CSIS dan CASER), INDOCEEM (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan LPEM FE UI), WAYANG-B (IPBBogor).

Model CGE juga merupakan alat yang *powerful* untuk menganalisa efek ekonomi dari FTA (*Free Trade Agreement*). Model ini didasarkan atas struktur teori ekonomi yang luas dan jelas dalam sebuah kondisi keseimbangan umum yang tercermin di dalamnya. Studi persetujuan perdagangan bebas Asia Timur biasanya menggunakan GTAP (*Global Trade Analysis Project*) database namun bervariasi dalam masing-masing asumsi model, tingkah laku dari agen-agennya, skenario kebijakan yang dianalisis dan versi dari database yang digunakan. Pendekatan simulasi yang inheren didalam model CGE dapat memberikan

titik terang akan efek-efek dari model persetujuan perdagangan yang berbeda-beda (Misal: Skenario ASEAN+3 atau ASEAN+Cina atau Jepang atau Korea). Hasil dari studi CGE dapat memberikan ilham-ilham akan arah numerik dari keuntungan dan kerugian yang didapat dari liberalisasi beserta distribusinya pada negara, regional dan sektor yang berbeda-beda.

Hasil dan Pembahasan Dinamika Kerjasama Indonesia Dan Asia Timur

Ide akan kerjasama ekonomi Asia Timur muncul untuk pertama kalinya pada Desember 1990 ketika Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad melontarkan ide tentang pembentukan *East Asia Economic Group* (EAEG) yang terdiri dari negara-negara ASEAN, China, Jepang dan Korea. Segera setelah ide ini, Kementerian perdagangan dan perindustrian internasional Malaysia mengunjungi negara-negara ASEAN lainnya untuk menjelaskan ide EAEG ini. Pada pertemuan ASEAN *Economic Minister* (AEM) ke-22, justru bukan EAEG yang disetujui tapi adanya *East Asia Economic Caucus* (EAEC) yang kemudian direkomendasikan untuk menjadi bagian pembicaraan pada KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada awal 1992.

Pada akhir Desember 1997, Mahathir menjadi tuan rumah terhadap inagurasi historis dari pertemuan tingkat tinggi pertama dari ASEAN+3, yang kemudian diikuti dengan pertemuan tingkat tinggi ASEAN+1 dengan Presiden China,

PM Jepang, dan PM Korea. Selain faktor peran Mahathir, perkembangan historis yang juga patut dicatat adalah pidato kebijakan PM Jepang, Ryutaro Hashimoto di Singapura pada 14 Januari 1997, ketika kemudian Hashimoto mengusulkan akan "*broader and deeper partnership*" antara Jepang dengan ASEAN.

Kemudian pada pertemuan ASEAN+3 di Hanoi akhir 1998 disepakati bahwa para pemimpin ASEAN, China, Jepang dan Korea akan bertemu setiap tahunnya. Hasil lainnya adalah adanya keputusan untuk membentuk *East Asian Vision Group* (EAVG) yang diketuai oleh mantan menteri luar negeri Korea Dr. Han Sung Joo yang juga sekretariatnya dijalan oleh *Korea Institute for International Economic Policy*. Selain membentuk EAVG, para pemimpin negara-negara ASEAN+3 pada pertemuan tingkat tinggi di Singapura tahun 2000 mengajukan proposal untuk membentuk *East Asian Study Group* (EASG). Proposal tersebut digagas oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung. Pada pertemuan kelima ASEAN+3 di Bandar Seri Begawan pada 5 November 2001 Presiden Kim Dae Jung mengajukan tiga hal yang harus dilakukan oleh EAVG, yaitu: (1) Evolusi dari pertemuan ASEAN+3 dan pertemuan Asia Timur, bersama-sama dengan institusionalisasi proses kerjasama Asia Timur akan membentuk saluran komunikasi dan kerjasama reguler; (2) Pembentukan forum Asia Timur yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan perwakilan di luar pemerintah untuk penanganan sebagai

mekanisme institusional bagi pertukaran sosial dan kerjasama regional di Asia Timur; (3) Pembentukan *East Asian Free Trade Area* (EAFTA), dimulai dengan langkah interim dengan mengaitkan kawasan perdagangan bebas sebelumnya dalam konteks Asia Timur.

Untuk semakin mengokohkan fondasi kerjasama kawasan Asia Timur, pada bulan Desember 2005, negara-negara ASEAN+3 bergabung dalam suatu forum yang disebut *East Asian Summit* (EAS). Keterlibatan India, Australia dan Selandia Baru yang diusulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam EAS, terutama untuk membuat ASEAN + 3 makin 'punya gigi' yang kuat di lingkungan regional Asia Pasifik, menjadikan EAS yang juga beranggotakan negara-negara ASEAN tersebut makin luas dan besar pengaruhnya secara regional. Kekuatan lainnya dari EAS tersebut adalah berbagai masalah yang bersifat transnasional tampaknya akan lebih mudah diatasi melalui forum yang besar dan kompak sifatnya. Namun, disisi lain hal ini menjadi kelemahan yaitu pembentukan EAS dianggap terlalu luas jangkauan keanggotaannya dan perpaduan konsep-konsep kepentingan antar negara-negara yang terlihat 'semi kontradiktif' (antar dominasi ekonomi liberal, sosialis pasar, dan yang berada diantara dua kubu tersebut) serta 'tidak seajarnya' *leverage* ekonomi masing-masing negara Asia Timur.

Di tataran kongkrit, perwujudan regionalisme dalam bentuk gagasan East

Asian Community (EAC) ternyata tidak berkembang secepat yang diprediksikan semula. Bahkan forum East Asia Summit (EAS) yang semula diharapkan akan menjadi kendaraan menuju realisasi EAC ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Persaingan antara Jepang dengan China sangat mewarnai dinamika dalam EAS. Dilibatkannya Australia, Selandia Baru dan India dalam EAS menyebabkan forum ini kehilangan fokus yang semula menjadi sasaran akhirnya, yaitu integrasi ekonomi di Asia Timur. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa China (disamping India) juga merupakan pesaing yang amat kuat bagi negara-negara ASEAN. Baik negara-negara ASEAN maupun China masih terus melaksanakan proses industrialisasi dan cenderung memperkuat diri pada *Export Oriented Industry* (EOI). Produk-produk mereka, yang didasarkan pada pemilikan kekayaan alam dan buruh murah, cenderung memiliki karakteristik yang sama. Tambahan lagi, dengan sistem ekonomi yang makin terbuka, baik negara-negara ASEAN maupun China selalu berusaha untuk menarik FDI dari seluruh dunia, suatu hal yang membawa mereka pada suatu kompetisi yang kuat satu sama lain. Oleh karena itu fokus perhatian ASEAN kembali bergeser, dari EAS kepada peningkatan integrasi dalam ASEAN sendiri.. Pada KTT ASEAN di Cebu, Januari 2007, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo menyatakan dalam statemennya bahwa dengan menyatukan pasar dan berintegrasi dalam suatu sistem produksi regional, negara-negara di ASEAN

diharapkan dapat menjadi tempat investasi yang lebih menarik. Ini, setidaknya dimata Arroyo, lebih baik dilakukan daripada negara-negara ASEAN bersaing secara sendiri-sendiri berhadapan dengan China. Oleh karena itu hasil yang terpenting dari KTT ASEAN di Cebu, Januari 2007 adalah keputusan untuk mempercepat realisasi ASEAN Community, termasuk ASEAN Economic Community (AEC) dari tahun 2020 kepada 2015. Namun, selain sebagai ancaman, China juga merupakan suatu kesempatan pasar yang besar. China adalah tempat bagi beraneka *regional and global production networks*, dimana China menjadi basis bagi proses sejumlah besar produk manufaktur dalam beragam jenisnya. China mengimpor bahan baku, *parts* dan komponen dari seluruh penjuru Asia, dan kemudian memprosesnya menjadi barang jadi untuk pasar regional dan global seperti AS dan Uni Eropa. China telah menjadi pijakan utama bagi jaringan *international supply chains*. Ini dapat menjadi katalisator sekaligus ancaman bagi integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur, tak terkecuali ASEAN.

Regionalisme ekonomi melalui *regional trade agreement* di satu sisi memang memberikan peluang bagi suatu negara, terkait dengan semakin luasnya pangsa pasar yang bisa dimasuki dengan beban tarif yang rendah. Akan tetapi *regional trade agreement* tersebut berkonsekuensi pada semakin tingginya tingkat persaingan antar negara di wilayah tersebut. Apalagi jika komoditas yang

diperdagangkan sama. Bagi Indonesia kompetisi regional yang semakin meningkat ini merupakan konsekuensi logis dari diterimanya kebijakan pembentukan *regional trade agreement*. Permasalahannya adalah apakah produk Indonesia cukup kompetitif di tataran regional Asia Tenggara maupun di Asia Timur.

Di sisi lain, bagi negara yang ekonominya lebih kuat dan maju, jalur regionalisme dipandang tidak efektif dibandingkan jalur bilateralisme yang ditempuh melalui *bilateral trade agreement* atau FTA bilateral. Di antara negara-negara ASEAN, Singapura adalah negara yang paling progresif sekaligus paling maju dalam FTA bilateral. Saat ini Singapura terlibat dalam tidak kurang dari 22 FTA, baik yang telah ditandatangani maupun yang sedang dalam proses perundingan, yang melibatkan AS, Jepang, Uni Eropa, Australia, Bahrain, dan seterusnya. Thailand menduduki tempat kedua dalam hal "progresifitas" perundingan FTA bilateral, dengan keterlibatannya dalam 9 perundingan FTA bilateral, baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses (lihat www.bilaterals.org).

Dilihat dalam kerangka regionalisme, langkah-langkah "bilateralisme" negara-negara ASEAN tersebut tentu agak disayangkan, dan sekaligus memberikan indikasi bahwa regionalisme di ASEAN sesungguhnya tidak dilakukan dengan "sepenuh hati" oleh anggota-anggotanya. Tidak ada mekanisme untuk "menegur"

negara-negara anggota ASEAN yang menempuh “jalan belakang” negosiasi bilateral, yang kemudian akan memacu negara-negara anggota ASEAN lain berbuat serupa.

Studi Chandra dan Pambudi (2006) menggarisbawahi bahwa sejauh ini belum terlihat keinginan dari negara-negara ASEAN untuk secara kolektif menggunakan ASEAN sebagai blok ekonomi untuk memperkuat posisi tawar-menawar dengan pihak lain. Dalam kerangka regionalisme dan penguatan ASEAN secara kelembagaan, tentu amat disayangkan bagaimana negara-negara ASEAN cenderung “jalan sendiri” dengan membuat kesepakatan perdagangan bebas bilateral tanpa melibatkan atau minimal berkonsultasi dengan ASEAN sebagai organisasi.

Munakata (2006) melukiskan strategi dalam negosiasi perdagangan negara-negara ekonomi kuat di Asia Timur dan Tenggara dengan istilah “*strategic opportunism*”, yaitu mengeksploitasi FTA dari sisi-sisi yang “termudah” (*doable*) dan paling menguntungkan bagi mereka, dengan bertindak dan bereaksi atas langkah-langkah negara lain secara *ad hoc* dan *case by case*. Akibatnya, konsistensi menjadi sesuatu yang minimal dibandingkan pragmatisme dan ambivalensi.

Dibandingkan Singapura dan Thailand, Indonesia terhitung “setia” dengan *track* regionalisme *via* ASEAN. Saat ini Indonesia baru menandatangani

satu FTA bilateral, yaitu dengan Jepang (Agustus 2007), dan baru berada dalam penajakan dan perundingan awal dengan AS, Australia dan Selandia Baru. Bahkan gagasan Komunitas ASEAN muncul ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun 2003. Wacana ASEAN sebagai *driving force* kerjasama regional di Asia Timur, yang kini jadi wacana “resmi” ASEAN, juga berasal dari Indonesia.

Yang harus dicermati adalah bagaimana strategi *go with* ASEAN yang kita pilih tidak melukai kepentingan nasional kita sendiri. Sebagai pemimpin informal dalam ASEAN, Indonesia juga perlu selektif dalam memilih kesepakatan regional yang bermanfaat. Dalam hal ini Jagdish Baghwati (1992) menyatakan, terlalu banyak kesepakatan regional akan memperbesar biaya dari segi sumber dana negosiator maupun *deadweight loss* yang terus terjadi, karena pelaksanaan berbagai kesepakatan preferensial menuntut negara untuk tunduk pada berbagai aturan dan ketentuan.

Dalam hal FTA bilateral, Indonesia tidak memandang perlu dibuat FTA bilateral dengan China. Menurut Menteri Perdagangan Mari Pangestu, FTA China – ASEAN (CAFTA) sudah cukup bagi Indonesia. Indonesia semakin menyadari bahwa lebih sulit untuk menjadikan China sebagai “partner ekonomi” ketimbang pesaing yang tangguh di bidang perdagangan, karena kemampuannya memproduksi barang secara massal dengan harga yang amat kompetitif.

Dalam hal perdagangan, Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa, paska-krisis, penampilan ekspor Indonesia ke mancanegara mengalami stagnasi. Untuk Tingkat ASEAN, posisi Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand. Bahkan kini Indonesia telah disusul dan dilampaui oleh Vietnam, Laos, dan Cambodia, khususnya untuk produk pertanian.⁹ Hal utama yang perlu diperhatikan adalah mengenai efisiensi produksi industri Indonesia. Efisiensi ini mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dengan produk-produk negara lain. Efisiensi ini, sayangnya, menjadi sebuah upaya yang sangat sulit untuk dilakukan di Indonesia, yang kemudian berdampak pada penurunan daya saing produk-produk Indonesia akibat harganya yang tidak kompetitif. Penurunan daya saing tersebut disebabkan karena industri domestik di Indonesia masih harus menanggung biaya infrastruktur yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah. Biaya infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas transportasi maupun sarana pendukung lainnya menjadi sebuah tuntutan bagi kalangan industri yang ingin membuka usahanya di Indonesia. Jika biaya-biaya ini masih dibebankan kepada kalangan industri, maka akan sangat sulit bagi produk Indonesia untuk bisa memiliki harga yang bersaing di pasar global, dengan produk-produk dari Malaysia misalnya, yang tidak

harus menanggung biaya-biaya infrastruktur tersebut.¹⁰

Data Bank Dunia menunjukkan bahwa dalam peringkat ekspor barang, Indonesia berada di posisi ke-26 dengan pangsa pasar hanya 1 persen. Sedangkan China menduduki posisi teratas dari kelompok negara Asia dengan sahamnya hampir mencapai 4 persen. Negara Asia lain yang berada di atas Indonesia adalah Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia masih lemah dalam perdagangan jasa, padahal di masa depan perdagangan jasa juga akan mendominasi dunia. Hong Kong dan China menduduki posisi teratas dari kelompok negara Asia, masing-masing dengan pangsa pasar 3,1 persen dan 2,1 persen. Data World Bank ini menunjukkan bahwa produk Indonesia, jasa dan non jasa, masih kalah bersaing atau dengan kata lain kurang kompetitif dibandingkan produk beberapa negara Asia Timur lainnya. Meskipun, di Asia Tenggara, Indonesia hanya mengalami defisit neraca perdagangan dengan Thailand.

Langkah China untuk memperdalam kaitan regional dengan ASEAN telah diimbangi oleh langkah-langkah Jepang untuk "mengamankan" kepemimpinan ekonominya di Asia Timur. Pada tanggal 13 Januari 2002 PM Koizumi menandatangani persetujuan FTA dengan

⁹ World Bank, *Executive Summary: Making Indonesia Competitive: Promoting Exports, Managing Trade*, Document of the World Bank, 2004, hal.I.

¹⁰ Dokumen hasil wawancara dengan Drajad Hari Wibowo, 5 Agustus 2004

Singapura. Sehari kemudian (14 Januari 2002) Koizumi mengumumkan statemen berjudul "Japan and ASEAN in East Asia – a Sincere and Open Partnership" yang menegaskan komitmen untuk pendalaman dan perluasan kemitraan Jepang-ASEAN di berbagai bidang termasuk ekonomi dan keamanan.

Negosiasi FTA Jepang – ASEAN telah dimulai pada tanggal 14 April 2005. Hingga putaran kelima perundingan tersebut di Jakarta pada tanggal 31 Juli – 1 Agustus 2006, pembicaraan yang dilakukan oleh Trade Negotiation Group (TNG) dan Trade Negotiation Committee (TNC) yang masih membicarakan struktur kesepakatan FTA ASEAN – Jepang, dapat dikatakan belum mencapai hasil yang diharapkan. Sesuai dengan strategi yang dirancang oleh Jepang, FTA bilateral antara Jepang dengan negara-negara ASEAN per individu berjalan lebih cepat daripada perundingan FTA ASEAN – Jepang. Karena sifat ekonomi Jepang yang cenderung komplementer dengan negara-negara ASEAN, hampir seluruh negara ASEAN telah menandatangani FTA bilateral dengan Jepang, termasuk Indonesia.

Cara pandang Indonesia terhadap Jepang adalah melihatnya sebagai kekuatan ekonomi yang tetap potensial untuk berperan dalam kebangkitan ekonomi Indonesia setelah mengalami pukulan yang berat sejak 1997-1998. Seperti disinggung di atas, karakteristik ekonomi China amat berbeda dengan

Jepang. China lebih mengutamakan buruh murah di dalam negerinya sebagai sumber keunggulan ekonomi. China mengutamakan perdagangan, sementara Jepang yang mendasarkan ekonominya pada penggunaan teknologi tinggi dalam pembuatan manufaktur mengutamakan investasi untuk memproduksi di negara-negara lain. Jepang merupakan "investor tradisional" di kawasan ASEAN sejak 1970-an. Secara regional juga telah tercipta *Japanese regional Production network* di ASEAN. Sebaliknya, karena mengandalkan perdagangan, volume investasi (FDI) China di ASEAN, termasuk Indonesia, terhitung kecil.

Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan (Economic Partnership Agreement/EPA) pada bulan Agustus 2007 diharapkan dapat meningkatkan beraneka produk Indonesia ke Jepang, disamping meningkatkan investasi Jepang di Indonesia. EPA Indonesia – Jepang yang merupakan "FTA bilateral plus" ini diharapkan akan meningkatkan total ekspor Indonesia sekitar 4,68 persen dari total ekspor sebelumnya. Jepang pun akan menghapuskan bea tarif untuk 9.275 item tarif dalam perdagangan barang dan jasa. EPA dengan Jepang ini diharapkan akan meningkatkan kesempatan bisnis sebesar 65 milyar USD pada tahun 2010.

Penandatanganan EPA ini juga merupakan tonggak penting bagi upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi Jepang di Indonesia. Hampir tidak terhitung jumlah kunjungan dan promosi guna

mengundang investasi Jepang ke tanah air. Juga telah dibentuk *Joint Forum on Investment* untuk kepentingan serupa. Tampaknya pemerintah Indonesia ingin sekali mengembalikan kedudukan Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia sepanjang masa Orde Baru.

Obsesi mengembalikan posisi

Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia tampaknya tidak mudah dicapai. Di tengah gencarnya kunjungan dan promosi bisnis Indonesia ke Jepang, nilai investasi Jepang dalam periode Januari – November 2006 mengalami penurunan 61,3 persen dibandingkan dengan nilai investasi Jepang dalam periode yang sama pada tahun 2005¹¹.

Tabel 2 : Iklim Investasi Negara-negara ASEAN dan India (Januari - Februari 2006)

	ASEAN	Thailand	Malaysia	Singapura	Indonesia	Filipina	Vietnam	India
Stabilitas Sosial dan Politik	0,48	0,91	0,85	0,96	-0,23	-0,17	0,74	0,50
Transparansi Peraturan Investasi	0,39	0,69	0,66	0,93	-0,17	0,10	0,07	0,23
Sistem Pajak	0,32	0,50	0,62	0,97	-0,35	0,10	0,07	-0,13
Infrastruktur	0,07	0,65	0,67	0,96	-0,60	-0,65	-0,75	-0,78
Kemudahan untuk mengatur tenaga kerja	0,34	0,52	0,21	0,85	-0,04	0,17	0,48	0,00
Keahlian dalam riset dan teknologi	-0,14	-0,07	-0,10	0,75	-0,66	-0,35	-0,21	0,33
Resiko nilai tukar	-0,03	0,13	0,30	0,52	-0,68	-0,46	0,28	-0,13
Prosedur Pabean	0,35	0,42	0,64	0,96	-0,14	0,23	-0,07	-0,41
Proteksi hak kekayaan intelektual	0,23	0,34	0,39	0,94	-0,12	-0,02	-0,07	0,04
Rata-rata	0,19	0,43	0,43	0,81	-0,34	-0,12	-0,01	0,04

Sumber: JETRO dalam <http://www.jetro.go.jp/jpn/stats/data/pdf/trade2005.pdf>

¹¹ *Kompas*, 6 Desember 2006.

Tahun 1997 investasi Jepang mencapai 5,3 milyar USD, dan turun menjadi 635 juta USD pada tahun 2002, lalu naik secara moderat menjadi 1,68 milyar USD pada tahun 2004. Tahun 2005, Indonesia hanya menduduki urutan ke-8 dari sejumlah negara yang menjadi tujuan investasi Jepang, dan tahun 2006 turun ke urutan 9¹².

Persepsi Jepang terhadap iklim investasi di Indonesia tercermin dari penilaian resmi Japan External Trade Organization (JETRO). Di mata JETRO, Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya memiliki iklim investasi yang tidak terlalu baik. Indikator positif dan negatif iklim investasi tersebut dinilai berdasarkan stabilitas sosial dan politik, tingkat transparansi peraturan investasi, sistem pajak, infrastruktur, kemudahan untuk mengatur tenaga kerja, keahlian sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi, resiko nilai tukar mata uang luar negeri, prosedur pabean, serta tingkat proteksi hak kekayaan intelektual. Untuk Indonesia, nilai masing-masing indikator tersebut berkisar di level negatif dan paling rendah adalah pada indikator resiko nilai tukar (lihat tabel 3.7.). Dalam tabel 3.7, terlihat bahwa JETRO memberikan total skor negatif yaitu -0,34 terhadap iklim investasi di Indonesia. Skor negatif tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Thailand yang sama-sama mendapat skor 0,43. Skor Indonesia bahkan masih

berada di bawah Filipina (-0,12) dan Vietnam (-0,01)

Ini menunjukkan bahwa dibandingkan negara ASEAN lainnya *plus* India, iklim investasi di Indonesia masih sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar akibat ulah para spekulan. Berdasarkan indikator tersebut, pemerintah seharusnya dapat membenahi hal-hal yang dipandang dapat menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia, terutama dengan memperbaiki infrastruktur, membina tenaga kerja ahli yang berbasis teknologi, serta memperketat aturan dalam sistem moneter dan perbankan.

Dengan indikator investasi Indonesia yang tidak kondusif tersebut, pangsa Indonesia dalam stok investasi langsung Jepang di luar negeri turun dari 6,6% pada tahun 1999 menjadi sekitar 1,98% pada 2005. Indonesia dalam hal ini mendapat persaingan dari China yang pangsa pasarnya meningkat dari 3,1% menjadi 6,4%. Bahkan Indonesia sebenarnya sudah kalah saing dengan Vietnam. Dilihat dari iklim investasinya saja, Vietnam memiliki nilai lebih positif dibandingkan Indonesia.

Sebuah survey yang dilakukan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa minat investasi Jepang yang utama adalah China, India, Vietnam dan Thailand.

¹² Syamsul Hadi, *ibid.*

Untuk sektor industri tertentu, ada keinginan kuat dari investor Jepang untuk memperluas basis produksi di bagian timur dan selatan China, demikian pula Thailand. China menjadi favorit untuk relokasi pabrik tekstil dan Thailand menjadi favorit untuk relokasi industri elektronik dan otomotif¹³.

Yang lebih memprihatinkan lagi, Indonesia termasuk negara dimana investor Jepang berencana menarik investasi atau mengurangi produksi. Dari hasil survey JBIC, tiga perusahaan Jepang yang berencana mundur dari Indonesia memilih Thailand (perusahaan otomotif) dan China (tekstil dan elektronik) yang menjadi tujuan relokasi industri dari Indonesia. Namun demikian, dalam konteks pengurangan produksi, Indonesia masih unggul dibandingkan Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara ASEAN yang ingin dihindari investor Jepang dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini adalah akibat kebijakan diskriminatif pemerintah yang pro kelompok bumiputera.

Negara-negara yang menjadi tujuan relokasi para investor Jepang memenuhi beberapa kriteria, antara lain potensi pasar yang akan terus membesar, potensi pertumbuhan ekonomi ke depan, dan potensi negara tersebut sebagai basis perakitan produk dan sumber bahan baku yang murah serta buruh murah. Di mata investor Jepang, Indonesia kalah dari Thailand dalam hal-hal di atas, walaupun

Indonesia masih lebih unggul dari Malaysia, Filipina dan Vietnam untuk bisnis elektronik dan produk kimia dari segi potensi keuntungan.

Meski daya saing Indonesia lebih rendah dari Thailand di sektor otomotif, namun namun sektor ini tampaknya tetap menyimpan potensi bagi Indonesia. Peluang yang dapat digunakan Indonesia untuk menambah daya saing adalah pemanfaatan *capacity building* bagi *supporting industry automotive* yaitu dalam peningkatan standard mutu komponen kendaraan bermotor terutama yang berbahan baku karet.

Bulan Februari 2007 BKPM mengumumkan bahwa realisasi FDI di sektor otomotif mencapai 438,5 juta dollar AS di tahun 2006, angka tertinggi dalam kurun enam tahun sejak tahun 2000. BKPM melaporkan bahwa investor asing merealisasikan 28 proyek di tahun 2006, dibandingkan 31 proyek di tahun 2005. Nilai 438,5 juta dollar AS pada tahun 2006 mencerminkan kenaikan 22 % dari 359.7 juta dollar AS yang diinvestasikan di sektor ini pada tahun 2005. Menurut BKPM, sektor otomotif mencakup 7,3 % dari keseluruhan proyek FDI di tahun 2006¹⁴.

Potensial dan Tren Masa Depan dari Perdagangan dan Investasi

Dalam analisa ini digunakan model

¹³ *Kompas*, 23 Januari 2008.

¹⁴ http://jakarta.usembassy.gov/econ/trade-invest_feb07.html, di akses pada 26 Januari 2008.

gravitasi. Salah satu aplikasi yang berguna dari model gravitasi adalah penggunaannya untuk mengestimasi potensi dari perdagangan tambahan diantara dua negara, baik di dalam dan di luar sampel. Pertama kita dapat menggunakan koefisien dari persamaan gravitasi dan data aktual dari GDP dan jarak diantara kedua negara untuk memperoleh prediksi tingkat perdagangan. Perbedaan diantara tingkat prediksi dan aktualnya dapat dilihat sebagai "potensi perdagangan". Nilai potensial yang positif menunjukkan adanya ada 'ruang' perdagangan lebih yang dapat dicapai diantara pasangan dua negara tertentu begitu pula sebaliknya.

Studi menghitung gap potensial dan aktual ekspor dari dua model gravitasi yang menggunakan negara-negara ASEAN sebagai negara asal dan negara-negara Asia Timur sebagai negara asal pada model yang lainnya. Artinya secara sederhana kita ingin melihat apa yang terjadi jika Indonesia tetap mempertahankan hubungan perdagangan yang erat diantara negara-negara ASEAN atau melebur ke dalam jaringan perdagangan negara-negara Asia Timur.

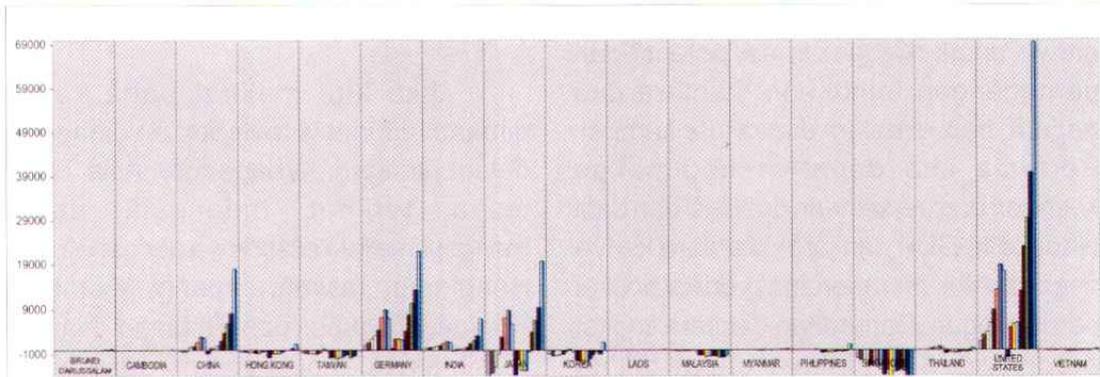
Negara dimana ekspor Indonesia mempunyai performa yang baik (gap yang negatif), tidak terlihat signifikan pada model kasus pertama (dengan ASEAN sebagai basis intraregionalnya). Mungkin yang tidak begitu kelihatan adalah ekspor Indonesia dengan Singapura yang telah cukup optimal, namun masih banyak potensi yang belum digunakan secara baik

pada khususnya pada negara Cina, Jepang, India, dan Jerman.

Jika kita melihat pada kasus dimana Indonesia meleburkan dirinya ke dalam jaringan perdagangan Asia Timur maka terlihat Indonesia dapat mengoptimalkan ekspornya dengan Korea, Hongkong, Taiwan, Jepang, Myanmar, Filipina, Singapur dan Thailand. Namun masih terdapat pula potensi yang besar untuk dioptimalkan pada ekspor ke Cina, Jerman, India, Jepang dan Amerika. Secara keseluruhan jika dibandingkan kedua skenario ini, maka secara ekonomi Indonesia akan lebih diuntungkan jika melebur ke dalam jaringan perdagangan Asia Timur. Hal ini sesuai dengan teori perdagangan internasional dimana arus perdagangan akan meningkat seiring dengan semakin menurunnya hambatan perdagangan diantara negara-negara terkait. Berdasarkan laporan IAP (*Individual Action Plan*) untuk Indonesia terakhir, ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) dan AKFTA (Korea Free Trade Area (AKFTA) dan IJEPA (Indonesia – Japan Economic Partnership) telah terbentuk, sedangkan ASEAN-India FTA dan ASEAN-Australia-New Zealand masih dalam negosiasi.

Oleh karena itu dengan menggunakan model gravitasi pertama dibuatlah estimasi arus perdagangan aktual dan potensial untuk ASEAN-India, ASEAN-Korea, ASEAN-Jepang, ASEAN-Cina dan ASEAN plus *Three*. Untuk ASEAN plus *Three* dibuat juga

Gambar 2. Ruang Ekspansi Ekspor: Kasus Indonesia Versi Kedua



Note: Kasus versi kedua ini dengan menggunakan negara-negara Asia Timur sebagai asal yang artinya perdagangan intra-regional diasumsikan seakan-akan telah terintegrasi di kawasan Asia Timur.

berdasarkan model gravitasi kedua sebagai perbandingan. Berikut akan dipaparkan hasilnya.

Jika hubungan perdagangan ASEAN dan India dapat terbentuk maka efeknya tidak terlalu signifikan, karena secara rata-rata hubungan perdagangan antara negara-negara ASEAN dan India telah cukup baik secara inter-regional. Sejak tahun 1998 negara-negara ASEAN mampu meningkatkan performa ekspornya dalam mengoptimalkan gap yang terjadi di pertengahan dekade 1990-an.

Negara-negara ASEAN diuntungkan dengan perjanjian ACFTA. Hal ini terlihat pada potensi ekspor yang meningkat dengan drastis sampai di tahun 2006. Artinya dengan terbukanya perekonomian Cina yang memiliki pasar yang amat besar merupakan kesempatan yang harus bisa dioptimalkan oleh negara-negara ASEAN dalam meningkatkan volume perdagangannya dengan Cina.

Hubungan perdagangan dengan Korea yang tertuang dalam bentukan AKFTA juga cukup menguntungkan bagi ASEAN. Di Indonesia sendiri investasi Korea ke Indonesia meningkat dengan cukup pesat. Tapi disini terlihat potensi perdagangan dengan korea meningkat tajam setelah 2002 seiring dengan pertumbuhan ekonomi Korea yang meningkat dengan pesat. Namun jika dibandingkan dengan hubungan ASEAN dengan Cina, potensi-nya tidak sebesar itu.

Hubungan perdagangan dengan Jepang masih dalam negosiasi, namun disini terlihat sekali jika hubungan tersebut dapat tercapai terdapat potensi ekspor yang amat besar ke Jepang yang dapat diutilisasikan oleh negara-negara ASEAN. Jepang sebagai negara Asia terdepan mempunyai tingkat daya beli yang tinggi yang merupakan pasar besar bagi perekonomian negara-negara ASEAN.

Secara keseluruhan bentukan

ASEAN plus *Three* mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, dimana terdapat potensi ekspor yang besar dan cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Namun terlihat jika ASEAN plus *Three* melakukan perdagangan *dalam lingkup* Asia Timur, akan terjadi sinergi yang tinggi diantara mereka dengan performa yang baik (Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya gap pada simulasi yang dilakukan).

Secara keseluruhan, pembentukan kerjasama perdagangan Asia Timur cukup menguntungkan. Namun jika ASEAN ingin mempertahankan kedudukannya maka potensi yang besar untuk arus perdagangan yang lebih luas pertama-tama adalah dengan Jepang, Cina, Korea dan terakhir

dengan India yang terlihat kurang terdapat ruang yang cukup tinggi untuk pengembangan arus perdagangan yang lebih kuat.

Terlihat dari tabel dibawah sebagian arus investasi paling aktif terjadi diantara negara-negara Asia Timur (sesuai dengan definisi). Disini terlihat, arus investasi dari Asia Timur ke Asia Tenggara secara rata-rata menurun, juga arus rata-rata negara Asia Tenggara ke Asia Timur. Sedangkan arus investasi di antara Asia Tenggara sendiri meningkat dan diantara negara-negara Asia Timur menurun namun masih dalam volume yang mempunyai tingkatan yang jauh berbeda. Integrasi antara negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara kemungkinan akan mampu menciptakan arus yang lebih tinggi lagi tidak seperti

Tabel 3 : Rata-rata Aliran Keluar FDI Hubungan Bilateral Intra-Asia ¹⁾
(dalam juta dollar US)

	Negara Tujuan					
	(1997-2000)			(2001-2005)		
	Asia Timur ²⁾	Asia Tenggara ³⁾	Asia Selatan ⁴⁾	Asia Timur ²⁾	Asia Tenggara ³⁾	Asia Selatan ⁴⁾
Negara Donor						
Asia Timur ²⁾	28,453.6	1,604.2	201.6	27,482.5	1,028.7	78.9
Asia Tenggara ³⁾	6,328.7	1,748.2	86.6	3,622.3	2,623.4	111.1
Asia Selatan ⁴⁾	0.0	42.9	5.2	0.0	27.3	14.6
Negara lainnya	42,812.3	21,340.5	3,732.2	46,489.8	21,056.5	3,821.0

Sumber : Data UNCTAD FDI/TNC

¹⁾ Berdasarkan data aliran masuk FDI pada ekonomi negara asal

²⁾ Asia Timur terdiri dari Cina, HongKong SAR, Korea, Taiwan POC, dan Macau SAR

³⁾ Asia Tenggara terdiri dari Brunai Darussalam, Kamboja, Lao PDR, Malaysia, myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, Dan Vietnam

⁴⁾ Asia Selatan terdiri dari Banglades, India, Sri Lanka dan Pakistan

Sumber : Data UNCTAD FDI7,266

yang terjadi sekarang dimana aktivitas investasi lebih dinamik terjadi pada regional masing-masing.

Pada tabel di bawah ini diperlihatkan FDI inflow yang masuk ke negara-negara di Asia Timur yang berasal dari USA, Jepang, NIEs, dan ASEAN. Indonesia sendiri secara total masih memiliki nilai rata-rata arus FDI inflow dari tahun 1995 sampai tahun 2005 yang kecil, bahkan jika dibanding Filipina dan Taiwan. Ternyata sebagian arus FDI Indonesia adalah berasal dari negara-negara Eropa yang tergabung dalam EU, diikuti dengan

Negara-negara NIEs dan ASEAN. Ini menunjukkan potensi keterkaitan arus FDI yang baik di dalam kawasan Asia Timur. Perbaikan infrastruktur dan regulasi dalam peningkatan investasi dapat meningkatkan potensi ini di masa depan, sehingga Indonesia tidak tergantung lagi dengan kucuran dana investasi yang berasal dari negara-negara yang tergabung di dalam EU.

Berdasarkan definisi UNCTAD, dapat dibuat matriks seperti berikut yang terkait dengan potensi dan performa FDI dari negara-negara yang ada. Disini terlihat

Tabel 4 : FDI Inflow Negara-negara Asia Timur, 1995-2005 (%)

FDI inflow menuju	Sumber Regional/Negara dari Inflow FDI menuju negara-negara Asia Timur						Total (US\$Mill)
	USA (%)	EU (%)	Jepang (%)	NIEs (%)	ASEAN 9 (%)	%	
NIEs	16.8	15.8	8.1	5.2	3.9	100.0	(437,999)
- Hongkong	5.1	7.4	5.7	5.3	1.8	100.0	(215,999)
- Korea	22.4	40.1	13.3	4.1	7.4	100.0	(55,975)
- Singapura	31.7	19.3	8.5	4.0	5.8	100.0	(142,748)
- Taipei	19.9	13.1	15.5	15.2	2.5	100.0	(23,277)
ASEAN 9	18.4	29.1	19.1	24.2	4.2	100.0	(116,413)
- Indonesia	5.7	50.9	3.3	19.0	9.3	100.0	(11,839)
- Malaysia	27.4	23.4	13.6	22.0	2.1	100.0	(44,651)
- Filipina	23.4	10.3	23.1	16.9	1.1	100.0	(13,709)
- Thailand	10.5	10.5	25.1	27.6	0.9	100.0	(37,428)
- Vietnam	4.8	19.1	14.4	39.2	6.6	100.0	(18,255)
Cina	8.1	8.1	8.6	54.0	1.6	100.0	(537,163)
Total	13.9	14.7	10.5	34.9	3.1	100.0	(992,516)

Sumber: UNCTAD, IFS, Sekretariat ASEAN, China Statistical Yearbook, OECD, IITI.

Tabel 5 : Potensi dan Performa FDI negara-negara Asia Timur (2002-2004)

	FDI berperforma tinggi	FDI berperforma rendah
Potensi FDI tinggi	Brunei Darussalam, Cina, Hong Kong, Malaysia, Singapur	Filipina, Korea, Taiwan, Thailand
Potensi FDI rendah	Vietnam	India, Indonesia, Myanmar,

Sumber: UNCTAD

Indonesia merupakan termasuk negara yang berpotensi FDI rendah dan juga berperforma rendah. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh Indonesia demi meningkatkan arus FDI yang masuk maupun yang keluar. Dengan dibukanya keran arus perdagangan yang lebih luas momentum kesempatan ini harus dapat digunakan untuk meningkatkan arus investasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, potensi perdagangan akan lebih luas, jika Indonesia memutuskan untuk meleburkan arus perdagangannya dengan jaringan negara Asia Timur lainnya, namun hal ini harus disikapi dengan berhati-hati karena tanpa persiapan yang matang, Indonesia tidak akan mampu meraup keuntungan sepenuhnya. Tingkat investasi Indonesia sendiri masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia timur lainnya sehingga diperlukan tindakan-tindakan yang signifikan baik dalam bentuk kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.

Analisis GTAP

Berikut ini akan dipaparkan analisis dari skenario-skenario perdagangan dengan menggunakan GTAP. Sebelum itu

kita perlu melihat kembali sejarah dari persetujuan-persetujuan FTA yang telah disepakati sebelumnya, pengimplementasiannya serta kemungkinan arah-arrah kerjasama-kerjasama lainnya. Jika kita lihat ASEAN sendiri telah mempunyai komitmen di tahun 2010 untuk melakukan integrasi dengan keputusan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN di tahun 2015. Perkembangan Terakhir adalah adanya perjanjian antara ASEAN dengan Cina, Korea dan Jepang yang disebut juga dengan ASEAN + 3. Sudah terdapat pembicaraan pula terhadap kemungkinan kerjasama antara ASEAN dengan India dan New Zealeand. Namun perkembangan terakhir dari kerjasama dengan kedua negara ini perlu dicermati lagi.

Berdasarkan perkembangan terakhir yang telah disarikan pada table diatas, maka dibentuklah 5 skenario simulasi yaitu scenario arus perdagangan diantara ASEAN dan Cina, ASEAN dan Jepang, ASEAN dan Korea, ASEAN+3 dan ASEAN+6. ASEAN+6 ini sendiri merupakan kemungkinan lain akan terjadinya integrasi di negara2 asia pasifik termasuk India, New Zealand dan Australia yang banyak juga menimbulkan pro dan kontra akan kesamaan budaya asia pada

negara seperti New Zealand dan Australia yang juga mempengaruhi peta ekonomi politik pada kawasan ini.

Skenario-skenario ini menunjukkan simulasi akan potensi pertumbuhan pendapatan nasional (PDB) dari kawasan terkait dan Indonesia. Skenario pertama, kedua dan ketiga telah dicapai dimana skenario ASEAN+3 dan ASEAN+6 telah menjadi diskusi yang panjang dalam studi kawasan di Asia Timur. Tabel diatas menunjukkan estimasi pengaruh pendapatan nasional dari skenario-skenario FTA yang ada. Skenario yang lebih besar pada ASEAN+3 dan ASEAN+6 memberikan keuntungan yang lebih luas terhadap pendapatan dunia dibanding skenario-skenario lainnya. Skenario ASEAN+6 memberikan keuntungan yang lebih besar terhadap pendapatan dunia sampai dengan 260 milyar dollar yang diukur terhadap harga konstan tahun 2001 dibanding dengan skenario ASEAN+3 yang sebesar 214 milyar dollar. Melihat secara terpisah pada skenario ASEAN+1, ASEAN+Cina memberikan keuntungan yang terbesar mencapai 82 juta dollar terhadap pendapatan dunia dibanding skenario ASEAN+1 lainnya.

Melihat angka-angka pendapatan dunia dengan lebih detail terlihat keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara yang menjadi anggota FTA adalah signifikan (sebesar 265 milyar dollar) dimana kerugian negara-negara lain yang tidak masuk ke dalam FTA manapun memiliki kerugian yang kecil saja sebesar

25 juta dollar. Pola yang sama ditemukan pada skenario ASEAN+3 dimana keuntungan dari anggota-anggotanya adalah sebesar 228 juta dollar dimana kerugian terhadap anggota-anggota lainnya hanya sebesar 14 juta dollar. Oleh karena itu, perolehan keuntungan dari anggota-anggota terkait dibanding negara-negara non anggota secara relatif memberikan kerugian yang relative sedikit secara keseluruhan.

Pengaruh dari formasi ASEAN+3 dan ASEAN+6 sendiri mempunyai pola yang berbeda pada negara dan regional terkait. Tiga negara Asia di Timur laut (anggota dari seluruh FTA yang diajukan) diharapkan mempunyai perolehan keuntungan terbesar pada skenario ASEAN+3 (166 milyar dollar) dan ASEAN+6 (172 milyar dollar). Perekonomian ASEAN (juga anggota dari FTA yang ada), memperoleh keuntungan terbesar pada skenario ASEAN+Cina (44 juta dollar) dibanding dengan skenario ASEAN+1 lainnya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pada skenario ASEAN+3 (62 juta dollar) dan ASEAN+6 (67 juta dollar). India, Australia dan New Zealand akan mengalami keuntungan atau kerugian tergantung dari apakah ASEAN+3 atau ASEAN+6 yang terbentuk. Tentunya mereka akan mengalami kerugian jika skenario ASEAN+3 yang terbentuk dan memperoleh keuntungan jika ASEAN+6 yang terbentuk.

Indonesia Sendiri memiliki keuntungan yang tentunya lebih tinggi jika

Tabel 6 : Efek Pendapatan dari Berbagai Skenario GTAP (dalam juta dollar)
(Dibandingkan dengan baseline tahun 2017 (pada dollar konstan tahun 2001))

	ASEAN+Cina		ASEAN+Jepang		ASEAN+Korea		ASEAN+3 ^{a/}		ASEAN+6 ^{b/}	
	Nilai	% per.	Nilai	% per.	Nilai	% per.	Nilai	% per.	Nilai	% per.
Asia Timur Laut	9,756	0.11	18,624	0.21	7,256	0.08	165,720	1.85	172,087	1.93
Jepang	-3,965	-0.08	24,943	0.51	-1,308	-0.03	74,825	1.54	77,137	1.59
Korea	-5,382	-0.67	-1,844	-0.23	10,916	1.37	49,393	6.19	51,351	6.43
Cina	19,103	0.58	-4,475	-0.14	-2,351	-0.07	41,502	1.26	43,598	1.33
ASEAN	44,211	3.72	28,831	2.43	8,088	0.68	62,186	5.23	67,206	5.66
Kamboja	68	0.75	30	0.33	15	0.16	107	1.20	109	1.21
Indonesia	6,924	2.30	2,834	0.94	1,475	0.49	7,884	2.62	8,588	2.86
Malaysia	7,551	4.02	4,453	2.37	1,339	0.71	10,391	5.54	11,869	6.33
Filipina	2,556	2.13	1,915	1.59	630	0.52	3,177	2.64	3,431	2.85
Singapura	6,854	4.13	3,171	1.91	793	0.48	7,943	4.79	9,002	5.43
Thailand	16,324	7.39	14,107	6.39	2,640	1.20	26,728	12.10	28,346	12.84
Vietnam	3,371	4.68	2,119	2.94	1,136	1.58	5,293	7.35	5,490	7.63
Lainnya	563	0.50	203	0.18	60	0.05	661	0.59	370	0.33
Asia Timur Lainnya	-2,676	-0.30	-1,124	-0.13	-528	-0.06	-11,649	-1.32	-13,530	-1.54
Hongkong	-112	-0.03	-68	-0.02	-73	-0.02	-1,051	-0.33	-1,900	-0.59
Taipei	-2,519	-0.49	-1,093	-0.21	-443	-0.09	-10,493	-2.03	-11,527	-2.23
Lainnya	-44	-0.11	38	0.09	-12	-0.03	-105	-0.25	-102	-0.24
Asia Utara	-1,059	-0.09	-823	-0.07	-530	-0.05	-3,620	-0.32	17,193	1.52
Bangladesh	-85	-0.08	-62	-0.06	-47	-0.04	-297	-0.26	-418	-0.37
India	-809	-0.10	-658	-0.08	-370	-0.05	-2,371	-0.30	19,270	2.42
Pakistan	-162	-0.11	-83	-0.06	-86	-0.06	-824	-0.55	-1,179	-0.79
Sri Lanka	-21	-0.07	-15	-0.05	-22	-0.07	-117	-0.38	-209	-0.67
Lainnya	19	0.05	-4	-0.01	-5	-0.01	-12	-0.03	-271	-0.73
OCEANIA	1,326	0.20	-1,272	-0.19	-26	0.00	-2,600	-0.38	26,385	3.88
Australia	1,046	0.18	-1,204	-0.21	-9	0.00	-2,376	-0.41	22,546	3.91
New Zealand	166	0.21	-73	-0.09	12	0.02	-216	-0.27	4,136	5.24
Lainnya	114	0.48	5	0.02	-28	-0.12	-8	-0.03	-296	-1.25
Asia Tengah	70	0.04	-41	-0.02	-26	-0.01	-159	-0.09	-205	-0.11
NAFTA	9,985	0.06	-214	0.00	273	0.00	-235	0.00	-4,474	-0.03
Kanada	1,211	0.12	363	0.04	155	0.02	1,796	0.18	1,546	0.15

Catatan:

/a ASEAN+3 termasuk 10 negara ASEAN dengan Cina, Jepang dan Korea

/b ASEAN+6 termasuk ASEAN+3 ditambah dengan Australia, India dan New Zealand

Sumber: Estimasi ADB

skenario ASEAN+3 dan ASEAN+6 yang terbentuk dengan pertumbuhan *welfare* sebesar 2.62 persen dan 2.86 persen. Namun menarik untuk dilihat ternyata pembentukan ASEAN+Cina juga

memberikan peningkatan angka pertumbuhan *welfare* yang tidak jauh sebesar 2.3 persen.

Jika dilihat dari perhitungan

Tabel 7 : Simulasi Kerjasama Perdagangan dengan Asia Timur
Untuk Pengaruh *Welfare*

Welfare (US\$ Million)	China		India		Korea		Asia Timur	
	Indonesia	ASEAN	Indonesia	ASEAN	Indonesia	ASEAN	Indonesia	ASEAN
1. NAFTA	(77,89)	(926,06)	(77,4)	(147,93)	(140,33)	(-295,26)	(89,65)	(1.331,02)
2. UE	(63,54)	(828,62)	18,95	(199,88)	(61,54)	(-213,86)	(44,34)	(1.193,31)
3. China	(27,18)	399,83	(22,12)	(166,46)	(236,79)	-308,62	(74,77)	21,72
4. Japan	(147,32)	(1.022,08)	(37,36)	(146,85)	(159,49)	(-258,71)	(216,55)	(1.387,25)
5. India	(26,15)	(126,99)	(157,22)	(482,90)	(431,94)	(-44,36)	(393,12)	(646,98)
6. Korea	(65,87)	(352,62)	(12,45)	(18,81)	(1.172,22)	(837,81)	(119,94)	(506,41)
7. ASEAN	(113,28)	2.677,59	(304,26)	1.922,72	(449,89)	183,9	(321,44)	4.796,26
8. Indonesia	461,65	357,08	932,42	569,28	898,15	45,18	1.436,66	970,61
9. ROW	(117,80)	(846,54)	(149,05)	(390,82)	(325,72)	(-388,92)	(283,12)	(1.583,49)

Sumber: Perhitungan GTAP

simulasi lebih lanjut antara kemungkinan bilateral FTA antara Indonesia Cina atau ASEAN+Cina dan ASEAN+1 lainnya kita dapat melakukan analisis yang lebih mendalam. Jika kita melihat dari sisi bilateral, ternyata lebih menguntungkan untuk Indonesia jika hal ini bisa dilakukan. Dapat kita lihat Indonesia akan memperoleh pertumbuhan GDP yang lebih tinggi (1.1%) jika melakukan perdagangan secara bilateral dengan Cina, jika dibandingkan perdagangan dengan Cina melalui ASEAN (0.9%). Begitu pula jika Indonesia melakukan perdagangan bilateral dengan India yang akan memberikan pertumbuhan sebesar 2.48 persen jika dibanding perdagangan India melalui ASEAN. Dengan Korea sendiri, peningkatan *welfare* Indonesia sendiri akan

amat signifikan jika melakukan hubungan perdagangan bilateral (2.41 persen) jika dibanding dengan perdagangan melalui koridor ASEAN (0.12 persen).

Hasil ini cukup mengejutkan, karena secara ekonomi politik arah perdagangan yang akan terjadi adalah melalui ASEAN. Untuk ini Indonesia perlu mengambil langkah yang hati-hati dalam melakukan perjanjian perdagangan dalam lingkup ASEAN untuk dapat mengoptimalkan keuntungan *welfare*-nya.

Pada bagian ini kita akan melihat secara lebih mendalam, struktur permintaan intra-regional dengan studi detail dari arus keterkaitan perdagangan mereka. Kita akan menggunakan data

ekspor kuartalan yang diperoleh dari DOTS (*Direction of Trade Statistics*) dan untuk Taiwan dari website kementerian keuangannya yang mempublikasikan data mereka. Sebelum itu marilah kita lihat perdagangan intra-regional pada kawasan Asia Timur beserta skenario-skenario yang mungkin terjadi pada kurun waktu 1980 sampai dengan 2006. Cara perhitungan dijabarkan pada catatan di bawah tabel berikut.

Jika kita perhatikan Share dari perdagangan intra regional pada kerangka

ASEAN+Cina+Korea+Hongkong dan Taipei yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari 22.7 persen ditahun 80-an menjadi 45.8 persen pada tahun 2006. kawasan ASEAN sendiri tidak mengalami pertumbuhan yang terlalu fantastis dari 40.6 persen di tahun 2000 menjadi 27.2 persen di tahun 2006 dimana sebelumnya di tahun 1980 juga hanya sebesar 17.9 persen dari total perdagangan interna-sional di dunia. Jika kita lihat perdagangan intra-regional pada

Tabel 8 : Share dari Perdagangan Intra-Regional (%)^a

Regional	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
NIEs(10) ^b	8.6	9.2	11.9	15.5	15.5	15.3	15.8	15.2	14.6	13.9	13.6
ASEAN(10) ^c	17.9	20.3	18.8	24.0	24.7	24.1	24.4	26.6	26.7	27.2	27.2
ASEAN+Cina+Korea+Hong Kong+Taipei (14)	22.7	27.2	33.0	39.1	40.6	41.1	43.4	44.7	45.2	45.5	45.8
ASEAN+3 (13) ^d	30.2	30.2	29.4	37.6	37.3	37.1	37.9	39.0	39.2	38.9	38.3
ASEAN+3+HK+Taipei(15)	36.8	39.0	43.1	51.9	52.1	51.9	53.8	55.4	55.9	55.4	54.5
ASEAN+6 (16) ^e	34.6	34.8	33.7	40.8	40.5	40.6	41.3	42.4	43.0	43.1	42.6
ASEAN+6+HK+Taipei (18)	40.5	42.7	46.3	54.5	54.6	54.5	56.3	57.7	58.5	58.4	57.6
NAFTA (3)	33.8	38.7	37.9	43.1	48.8	49.1	48.4	47.4	46.4	46.1	44.3
MERCOSUR	11.1	7.2	10.9	19.2	20.3	17.9	13.6	14.7	15.2	15.5	15.7
Old EU	60.7	59.8	66.2	64.2	62.3	62.2	62.5	63.0	62.2	60.4	59.5
New EU	61.5	60.0	66.8	66.9	66.3	66.7	67.4	68.1	67.6	66.2	65.8

Catatan:

/a Perdagangan intra regional dihitung sebagai $X_{ii}/[(X_{iw} + X_{wi})/2]$, dimana X_{ii} adalah nilai dari ekspor intraregional, X_{iw} adalah nilai dari total ekspor dari regional menuju dunia, dan X_{wi} adalah nilai total ekspor dari dunia menuju regional tersebut.

/b NIEs adalah Hing Kong, Cina, Korea, Singapur dan Taipei

/c ASEAN adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

/d ASEAN+3 adalah 10 negara ASEAN ditambah dengan Cina, Jepang dan Korea

/e ASEAN+6 adalah 13 negara ASEAN+3 ditambah Australia, New Zealand dan India

Sumber: IMF DoTS, Data Taipei dari website Bureau of Foreign Trade, dan Statistical Yearbook-nya

ASEAN+6 akan memberikan share intra-regional yang lebih besar sebesar 42.6 persen di tahun 2006 dibandingkan dengan ASEAN+3 sebesar 38.3 persen ditahun yang sama.

Pergerakan dari variabel ekspor juga dianalisis dengan memisahkan tiga komponen: Faktor musiman (*seasonal factor*), tren dan arus siklus (*cycle*). Disini kita menggunakan Hodrick-Prescott Filter untuk memecah pergerakan tersebut dan kemudian menganalisa komponen siklusnya.

Berdasarkan metodologi ini terlihat adanya sinkronisasi diantara arus perdagangan diantara intra-regional dan inter-regional yang menunjukkan bahwa permintaan secara keseluruhan masih didorong oleh permintaan final dari negara G3. Juga siklus perdagangan pada regional di Asia Timur menjadi lebih tersinkronisasi dengan perkecualian Cina dan Taiwan. Sinkronisasi ini terjadi baik pada siklus total ekspor dan ekspor intra-regional yang merefleksikan permintaan antara negara asia timur yang semakin terintegrasi dan faktor penawaran dimana jaringan produksi antar negara semakin terintegrasi.

Analisis korelasi untuk sebelum krisis 1997 dan sesudahnya juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari hubungan antar negara di Asia Timur menunjukan korelasi dari siklus ekspor yang meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukan siklus perdagangan yang

semakin tersinkronisasi seiring dengan berjalannya waktu. Disini terlihat terdapat korelasi yang meningkat secara pesat pada negara-negara Asia Timur yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah jika disbanding negara-negara Asia Timur lainnya seperti Myanmar, Cambodia. Laos terlihat belum mampu meningkatkan sepenuhnya keuntungan dari perdagangan internasional ini. Terlihat sekali disini Peran Cina yang kuat dalam meningkatkan arus perdagangan diantara negara-negara Asia Timur lainnya dengan koefisien korelasi yang cukup tinggi.

Asia Timur dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dari semua hasil-hasil analisis kuantitatif diatas tersebut, Indonesia secara perhitungan (teoretis) dapat meraih pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan mekanisme perdagangan internasional, khususnya di kawasan Asia Timur. Namun, tentunya hal-hal yang terkait dengan ekonomi politik, institusional dan diplomasi tidak bisa tercermin di dalam perhitungan-perhitungan tersebut. Agar Indonesia bisa mendapatkan hasil optimal seperti yang telah disimulasikan dalam model-model diatas, diperlukan koordinasi yang baik pada pemerintah, baik antar departemen, pemerintah daerah serta nasional dalam membawa Indonesia ke dalam kancah perdagangan internasional sebagai pemain yang dapat meraup keuntungan dari berbagai aspeknya dengan baik.

KESIMPULAN

- East Asia Summit (EAS tidak mentransformasikan ASEAN+3 kepada pembentukan suatu Komunitas Asia Timur atau *East Asian Community*. Kenyataannya, pilihan yang ditempuh oleh negara-negara ASEAN pada adalah: (1) FTA bilateral antarnegara; (2) pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015; dan (3) FTA dengan pola "ASEAN+1".
- Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang paling "setia" dengan mekanisme regional melalui ASEAN. Ironisnya, Indonesia seperti "terjebak" dalam komitmennya, sehingga mungkin tidak disadari bahwa kepentingan nasional kita tak jarang dikorbankan untuk "kepentingan regional".
- Kesamaan dalam hal *comparative advantage* diduga menyebabkan sulitnya meningkatkan perdagangan dan investasi intra ASEAN (sebagai bagian penting integrasi Asia Timur). Di ASEAN, partner dagang yang signifikan bagi Indonesia tetap Singapura, sementara partner dagang utama Indonesia lainnya tetap berada di luar ASEAN, seperti Jepang, AS dan Uni Eropa.
- Faktor China (dan India) yang makin lama makin terlihat nyata sebagai "pesaing ekonomi" negara-negara ASEAN sendiri menyebabkan negara-negara ASEAN "merapatkan barisan" dengan memutuskan percepatan perwujudan Komunitas ASEAN dari 2020 menjadi 2015
- Integrasi Asia Timur dapat memberikan *potensi* keuntungan yang baik untuk Indonesia. Perjanjian perdagangan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) dan AKFTA (Korea Free Trade Area (AKFTA) dan IJEPA (Indonesia – Japan Economic Partnership) yang telah terbentuk dilihat merupakan langkah yang tepat, karena potensi ekspor intra-regional ASEAN dengan ketiga negara tersebut memiliki potensi yang baik khususnya untuk Cina.
- Khusus untuk Perjanjian Perdagangan Asean-China dari hasil simulasi GTAP menunjukkan potensi peningkatan *welfare* bagi Indonesia yang sangat tinggi mendekati potensi peningkatan *welfare* pada skenario ASEAN plus *Three*. Hal ini menunjukkan potensi perdagangan yang sangat besar untuk Indonesia dan Cina. Secara bilateral mungkin saja perdagangan antar kedua negara dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- Untuk perjanjian ASEAN-India FTA terlihat tidak memberikan potensi

arus perdagangan yang sebesar jika dibanding dengan Cina, Jepang dan Korea. Pemerintah dapat mempertimbangkan kembali apakah akan meneruskan perjanjian dengan India ini.

- Secara keseluruhan integrasi ekonomi Asia Timur dapat memberikan keuntungan yang jauh lebih luas untuk Indonesia sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, jika dibandingkan dengan skema ASEAN plus *Three*.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

- Dalam menghadapi integrasi diperlukan persiapan yang matang untuk dapat meraup keuntungan dari perdagangan antar negara seluas-luasnya. Secara keseluruhan integrasi ekonomi Asia Timur dapat memberikan keuntungan yang jauh lebih luas untuk Indonesia sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, jika dibandingkan dengan skema ASEAN plus *Three*, namun pertimbangan ekonomi politik perlu dipertimbangkan disini.
- Selain menempuh regionalisme, Indonesia seharusnya berupaya melakukan pembicaraan-pembicaraan menuju terwujudnya FTA bilateral jauh lebih banyak dibandingkan jalur regional.

Berdasarkan pengalaman perekonomian Korea, suatu hasil studi menyarankan langkah-langkah konkrit sebagai berikut untuk meningkatkan performa FDI Indonesia:

1. Pemerintah Indonesia harus memikirkan status institusi-institusinya yang terkait dengan proses investasi (NAFED (*National Agency for Export Development*) dan BKPM) menjadi Perusahaan Publik (*Public Corporations*).
2. NAFED dan BKPM harus lebih mendengarkan lebih baik suara konsumen, karena hal yang terkesan tidak penting ini terbukti telah meningkatkan daya saing perekonomian Korea.
3. Pemerintah Indonesia harus membentuk sistem evaluasi yang objektif dengan penegakan hukum dan lain-lain untuk menurunkan biaya transaksi tinggi yang harus dihadapi investor.
4. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk me-*reshuffle* NAFED menjadi organisasi yang lebih terstruktur secara fungsi. Selama ini NAFED dibagi menjadi cabang-cabang regional, mungkin lebih baik lagi kalau NAFED dibagi fungsinya berdasarkan struktur industri

agar lebih fokus dan dapat dihasilkan performa yang optimal.

5. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan *me-merge* BKPM dan NAFED menjadi satu organisasi agar tercapai efisiensi dan koordinasi antar kedua fungsi yang semakin baik.
- Indonesia harus dapat memperkuat posisinya dalam jaringan produksi regional dimana perusahaan-perusahaan Jepang merupakan aktor utamanya, khususnya di sektor manufaktur. Hal ini tidak mudah mengingat minat investor (termasuk Jepang) di kawasan Asia Timur kini lebih tertuju pada China, Vietnam, India dan Thailand.
 - Dalam konteks jaringan produksi regional, Indonesia harus memperbaiki posisinya sebagai basis produksi yang masih potensial untuk industri elektronik dan kimia. Sektor otomotif, yang memiliki pangsa pasar domestik yang sangat potensial, khususnya untuk produk sepeda motor, juga perlu dipikirkan pengembangannya sebagai basis produksi dan penyedia lapangan kerja yang dapat diandalkan.
 - upaya peningkatan standar mutu produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja di Indonesia harus menjadi

agenda prioritas. Untuk itu pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan skema *capacity building* yang menjadi salah satu komponen penting dalam EPA Indonesia – Jepang untuk mengupayakan peningkatan kapasitas pekerja Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar regional dan internasional.

- Diplomasi perdagangan Indonesia yang cukup gencar dan aktif dalam berbagai bentuk FTA regional maupun bilateral, harus diimbangi dengan kongkretisasi upaya-upaya untuk memperbaiki iklim investasi, disamping meningkatkan daya saing produk-produk yang diharapkan dapat menjadi andalan ekspor Indonesia ke kawasan Asia Timur dan dunia.

Kebijakan perdagangan internasional Indonesia harus pula beriringan dengan kebijakan industri nasional yang diarahkan pada peningkatan daya saing SDM dan menghasilkan produk-produk unggulan di level regional dan internasional. Ini tidak bisa dihindari mengingat Indonesia tidak dapat terus mengandalkan basis ekonomi pada komoditas kekayaan alam yang bersifat “tidak tak terbatas” dan buruh murah yang juga bersifat sangat relatif, mengingat negara-negara seperti Vietnam dan China juga menawarkan buruh murah ini sebagai salah satu keunggulan komparatif mereka yang utama

REFERENSI

- Paas, Tiiu, "**Gravity Approach for Modeling Trade Flows Between Estonia and The Main Trading Partners**", University of Tartu, 2000
- Damodar N. Gujarati, "**Basic Econometrics**", Second Edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1988.
- Pyndick, Robert S., dan Daniel L. Rubinfeld, "**Econometric Model and Economic Forecasts**", Fourth Edition, McGraw-Hill, Inc., 1998.
- Dornbusch, Rudiger et al., "**Macroeconomics**", 7th ed. Irwin/McGraw-Hill, Boston: 1998.
- Krugman, Paul R. Dan M. Obstfeld, "**International Economics: Theory and Policy**", Addison-Wesley Publisher, 2000.
- Meyer, Klaus, "**Direct Investment in Economies in Transition**", Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 1998.
- Qiu, Larry D. dan Zhingang Tao, "**Export, Foreign Direct Investment and Local Content Requirement**". Working Paper Departement of Economics Hongkong University, Hongkong, 2001.
- Hossain, Akhtar, "**Open Macroeconomics for Developing Countries**", Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham:1998.
- Yanrui Wu, "**Foreign Direct Investment and Economic Growth in China**", Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 1999
- ASEAN Statistics, 2003,2004, 2005, 2006
Kertajaya, Hermawan dan Philip Kotler, Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community 2015, Singapore: Mc Graw Hill, 2007.
- Hadi, Syamsul, "Indonesia, ASEAN and East Asia", makalah seminar FTAs in Asia Pacific: Civil Society Perspectives, dipresentasikan dalam Konferensi Asia Pacific Research Network, di Sydney, Australia, September 2007.
- Hadi, Syamsul, "Kerjasama Indonesia – Jepang", dalam Kompas, 20 Agustus 2007.
- Munakata, Naoko, Transforming East Asia: the Evolution of Regional Economic Integration, Arlington: Brookings Institution Press, 2006.
- Chalermpananupap, Termsak, "Towards an East Asia Community: The Journey Has Begun", dalam paper yang dipresentasikan pada Fifth China-ASEAN Research Institute Rountable on Regionalism and Community Building in East Asia" 17-19 Oktober 2002
- Chandra, Alexander & Daniel Pambudi, Garuda Terbelit Nada, Jakarta: IGJ, 2006.

- Yip, Wei Kiat, "Prospect for Closer Economic Integration in East Asia", dalam *Stanford Journal of East Asian Affairs*, Spring 2001, Volume 1
- Deng, Yong, *Promoting Asia-Pacific Economic Cooperation. Perspective from East Asia*, London: Macmillan Press, 1997.
- Severino, Rodolfo C., *Southeast Asia in Search of An ASEAN Community*, Singapore: ISEAS Publisher, 2006, hal. 244-245.
- Choi, Young Jong, "A Rise of Regionalist Ideas in East Asia: "New East Asian Regionalism and Pax Americana" ", dalam paper yang dipresentasikan untuk International Conference on East Asia, Latin America, and 'New' Pax Americana, 14-15 Februari 2003.
- Wannan, Li, "Economic Relationship Between China and ASEAN: A Chinese Perspective", Makalah dalam konferensi internasional ASEAN-China Trade Relations: 15 Years Development and Prospects, diselenggarakan oleh Centre for ASEAN and China Studies, Vietnamese Academy of Social Sciences, Hanoi, 8 Desember 2007.
- Wong, John dan Lye Liang Fook, "ASEAN Perspective on China: Trade and Impact", dalam *Ibid*.
- The National Institute for Defense Studies, Japan, *East Asian Strategic Review*, Tokyo: Japan Times, 2003, hlm. 206 dan seterusnya.
- World Bank, *Executive Summary: Making Indonesia Competitive: Promoting Exports, Managing Trade*, Document of the World Bank, 2004.
- Tambunan, Tulus, "Siapakah Pengusaha Hadapi AFTA 2002," *Media Indonesia*, 08 Oktober 2001
- Direction of Trade Statistics (DoTS)***, IMF. ***World Economic Outlook*** 2007, IMF www.unctad.org. Data FDI inflow dan outflow.
- The 21th Century World Atlas***. Trident Press International.
- Pootrakool, Kobsak, Chayawadee Chai anat, Suchada Dejtrakul, dan Bunnaree Punnarach, "***Can We Count on Intra-regional Trade as a Source of Growth?***", Monetary Policy Group, makalah yang dipresentasikan pada BOT Symposium, Agustus, 2003.
- Feenstra, Robert C., James R. Markusen, dan Andrew K. Rose, "***Using the Gravity Equation to Differentiate among Alternative Theories of Trade***", *Canadian Journal of Economics*, Vol. 34 (2), hal. 430-447, 2001.
- Guerin, Selen Sarisoy dan Stefano Manzocchi, "***Political Regime and Vertical vs. Horizontal FDI***", LLEE Research, May 2007.

Kawai, Masahiro dan Ganeshan Wignaraja, "**ASEAN+3 or ASEAN+6: Which Way Forward?**", ADB Institute Discussion Paper No. 77, September 2007.

Institutions in Indonesia: Lessons from Korea's Development Experiences, September 2006.

Bisnis Indonesia, 21 Agustus 2001

Kementrian Keuangan dan Ekonomi, Republik Korea dan Sekolah kebijakan Publik dan Manajemen KDI, "**Reforming Key Economic**

Kompas, 08 Agustus 2001

Kompas, 6 Desember 2006.